

Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Accountability and Transparency in the Procurement of Library Materials at the Archives and Library Service of Kutai Kartanegara Regency

Sefira Dwi Wulandari¹, Yunita Fitria²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ *Corresponding author:* yunita.fitria@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan terpilih dan observasi dengan melakukan penyajian data dan reduksi data yang akan memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitian pada skripsi ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi penulis dan pernyataan beberapa informan yang patuh melakukan kewajiban terhadap prosedur terkait pencatatan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan prinsip transparansi diketahui tidak transparan terhadap publik. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil observasi penulis dan pernyataan beberapa informan yang mengakui bahwa laporan terkait anggaran tidak dipublikasikan ke publik dan terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi secara terbuka.

Abstract

This study aims to determine how the principles of accountability and transparency are applied in library material procurement activities at the Archives and Library Service of Kutai Kartanegara Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data collection methods were conducted through interviews with selected informants and observations, with data presentation and data reduction to facilitate the author's conclusions. The results of this thesis reveal that the implementation of accountability principles at the Archives and Library Service of Kutai Kartanegara Regency is good, as demonstrated by the author's observations and statements from several informants who comply with procedures related to recording and reporting to authorized parties. However, the principle of transparency is known to be less transparent to the public. This is evidenced by the author's observations and statements from several informants who acknowledged that budget reports are not published to the public and that access to open information is limited.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Sefira Dwi Wulandari, Yunita Fitria.

Article history

Received 2026-03-12

Accepted 2026-04-15

Published 2026-04-30

Kata kunci

Akuntabilitas;
Transparansi;
Pengadaan

Keywords

Accountability;
Transparency;
Procurement

PENDAHULUAN

Perpustakaan Daerah merupakan salah satu sektor publik yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tujuan sektor publik dapat berupa peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, produk atau jasa, peningkatan daya saing, dan peningkatan kinerja (Bambang dan Daryanto, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berhubungan dengan tata kelola pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan budaya membaca. Pemerintah daerah memiliki hubungan yang dinamis dan saling mendukung dalam menciptakan iklim pendidikan khususnya semangat membaca pada masyarakat. Peningkatan budaya membaca dalam suatu daerah terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masalah seperti kurangnya fasilitas perpustakaan daerah, minat membaca generasi muda yang menurun, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membaca dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai jembatan atau penggerak dalam membangkitkan iklim budaya membaca dan pembangunan pendidikan yang sehat bagi masyarakat.

Fungsi perpustakaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah setiap jenjang pendidikan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan, dan tempat rekreasi, penelitian pelestarian, untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, yang harus dilakukan oleh perpustakaan adalah berupaya untuk meningkatkan layanan perpustakaan.

Perpustakaan akan dikatakan berhasil apabila pemustakanya dapat memanfaatkan perpustakaan itu sendiri. Salah satu aspek agar perpustakaan sering dikunjungi atau banyak dimanfaatkan oleh pemustaka adalah pengadaan bahan pustaka perpustakaan. Sari (2023) berpendapat bahwa Pengadaan bahan pustaka merupakan bagian penting dari kegiatan perpustakaan, karena sejak awal berdirinya, perpustakaan telah memainkan peran penting dalam memajukan perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, baik yang masih ada maupun yang sudah usang, dan memenuhi kebutuhan ini merupakan tujuan utama perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan iklim pendidikan dalam hal budaya membaca bagi masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi juga diperlukan pada kegiatan pengadaan bahan pustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka tersebut dapat menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan segala hal yang tujuannya untuk memenuhi serta melayani kebutuhan pemustaka atau pengunjung perpustakaan.

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keyakinan atas hak yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan proses kekayaan daerah. Sedangkan transparansi menurut Umami dan Nurodin (2017), transparansi merupakan suatu tindakan memberikan keterbukaan informasi terkait keuangan ataupun kebijakan yang diambil serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Dengan adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi, maka kewajiban instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan tugasnya dalam melayani masyarakat tersalurkan dengan baik dan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Sehingga akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan dalam perencanaan maupun realisasi suatu kegiatan

sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengulas akuntabilitas dan transparansi di beberapa daerah. Pada penelitian sebelumnya oleh Ujang A., dkk. (2023) di daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan setempat mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa dengan penerapan sistem e-procurement. Seluruh kegiatannya tersimpan dalam satu sistem di portal sejak sistem online diterapkan sehingga informasinya dapat diakses dengan mudah. Pada penelitian lainnya oleh I Putu Heri (2021) di daerah Bali, penerapan transparansi di Pura Agung Asem Kembar sangat rendah karena penyampaian informasi keuangan hanya berupa dana masuk saja tanpa diikuti dengan informasi pengeluaran.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa kurangnya akuntabilitas dalam pelayanan publik yaitu belum pernah melakukan evaluasi kepuasan dan kebutuhan serta masukan dari pemustaka mengenai layanan, koleksi buku dan fasilitas yang ada. Meskipun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menyediakan ruang saran dan pengaduan publik di media massa. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara juga belum mempublikasikan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan dan berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan atas buku tersebut di media ataupun website resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum menjalankan prinsip transparansi kepada publik.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara karena pada Perangkat Daerah ini belum ada penelitian yang membahas sesuai penelitian yang penulis pilih. Penulis akan membahas mengenai kurangnya penerapan akuntabilitas pelayanan publik dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada pun Judul penelitian yang penulis pilih adalah "Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara".

METODE

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Menurut Purba (2021), penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar.

Sedangkan menurut Adiputra (2021), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2021), merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan interpretatif menurut Mudjia (2018) memandang kenyataan sosial sebagai sesuatu yang selalu berubah, berjalan dalam suatu proses dan penuh makna yang bersifat subjektif. Kenyataan sosial pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dalam paradigma interpretatif, manusia dipahami sebagai individu yang sadar dan bersifat intensional dalam setiap tindakan (*intentional human being*).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau situasi yang sedang diamati di lapangan dengan lebih khusus, transparan, serta menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek,

dan subjek penelitian. Analisis ini penulis gunakan dalam menganalisa akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengadaan bahan pustaka serta melihat kendala yang dihadapi selama proses pengadaan bahan pustaka. Penulis berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat, bertujuan untuk mengembangkan teori dan hasil akhir atau temuan bersifat open-ended yang artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan..

Penulis menggunakan informan sebagai subjek dalam penelitian ini, diantaranya adalah empat orang pustakawan dan satu pemustaka di perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kesediaan dan perwakilan dari beberapa bidang yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengadaan bahan pustaka. Informan yang penulis pilih antara lain dari Bidang Pembinaan Perpustakaan, Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dan Sekretariat Bagian Keuangan.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (2014) terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dikatakan terjadi secara bersamaan karena reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling jalin menjalin dalam proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai organisasi sektor publik, penting untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna membangun ikatan kepercayaan dengan masyarakat. Tidak sedikit organisasi sektor publik yang masih rendah akan penerapan akuntabilitas dan transparansinya. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pada suatu sektor publik tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecurigaan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi cukup penting di dalam organisasi sektor publik. Dengan adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi, maka kewajiban instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan tugasnya melayani masyarakat tersalurkan dengan baik dan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Sehingga akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan dalam perencanaan maupun realisasi suatu kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan pertanggungjawaban yang tidak dipublikasikan secara terbuka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Edwin selaku bagian dari sekretariat keuangan mengatakan dalam wawancara:

“Masalahnya ke publik ini, kita gak pernah ekspos ke publik. Biasanya sih di website itu jumlah buku mungkin. Di website itu memang harusnya ada penambahan e-katalog sebetulnya, sementara di website kami kan belum ada e-katalog nyangkut disitu, harusnya itu memang kedepannya memang mengarah kesitu. Tinggal kami aja lagi yang mempelajarinya e-katalog itu bisa connect dengan website kami itu.”

Sementara diketahui bahwa website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri baru dibuat pada tahun 2023 kemarin dan tidak dikelola dengan cukup baik. Ibu Heni selaku pustakawan mengatakan bahwa:

“Website kami itu baru aja dibikin tahun lalu, karena untuk memenuhi syarat akreditasi perpustakaan, selain itu pengurusnya aja ganti-ganti. Selanjutnya ternyata itu nggak mau dibiayain bagian umum.”

Oleh karena itu, website tersebut tidak cukup banyak menyajikan informasi mengenai keuangan ataupun kegiatan-kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Kutai Kartanegara. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bu Heni, adanya website yang menyajikan informasi-informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih dibutuhkan atau masih berperan penting sebagai salah satu bentuk transparansi kepada publik. Berdasarkan pernyataan informan diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki akuntabilitas dan transparansi yang masih cukup rendah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dari Mardiasmo yang telah mengungkapkan beberapa kriteria akuntabilitas dan transparansi.

Praktik Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal penting yang bersifat wajib bagi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program-program yang akan dijalankan suatu instansi pemerintahan. Akuntabilitas pada instansi pemerintah dapat berupa laporan keuangan, laporan kinerja ataupun keseluruhan proses kegiatan dari organisasi tersebut. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), terdapat dua dari lima kriteria yang menjadi permasalahan pada standar penerapan akuntabilitas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas Proses
- Akuntabilitas Program

Pemilihan dua kriteria yaitu akuntabilitas proses dan akuntabilitas program berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan reduksi data yang penulis lakukan. Sehingga ditemukanlah kriteria akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang mencakup permasalahan pada standar penerapan akuntabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setelah beberapa waktu penulis melakukan observasi dan wawancara di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis menemukan bahwa adanya kekurangan pada penerapan akuntabilitas. Diketahui bahwa ada beberapa laporan terkait rincian anggaran pengadaan bahan pustaka secara fisik belum dibuat oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan aplikasi INLIS Lite untuk menginput segala pencatatan pengadaan bahan pustaka, namun masih ada beberapa kekurangan dalam pencatatannya seperti ketidaklengkapan dalam mencatat harga bahan pustaka yang ada di perpustakaan.

Praktik akuntabilitas vertikal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh masing-masing tiap bidang kepada Kepala Dinas atau kepada otoritas yang lebih tinggi ketika ada pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan periode laporan yang berjalan. Secara praktik akuntabilitas vertikal, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan kriteria yang ada di dalam praktik akuntabilitas vertikal.

Praktik akuntabilitas horizontal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara mencantumkan beberapa informasi terkait laporan kinerja keuangan pada website resminya sebagai pertanggungjawaban kepada publik, namun website tersebut belum banyak menyajikan informasi secara lengkap karena kurangnya sumber daya manusia yang mengelola website tersebut. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan praktik akuntabilitas horizontal karena publikasi terkait laporan keuangan penggunaan dana publik tidak dilakukan dengan semestinya.

Praktik Transparansi

Penerapan transparansi ditunjukkan pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan kegiatan ataupun pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna atau publik yang membutuh informasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tiga kriteria bentuk transparansi yang menjadi permasalahan yaitu:

- Transparansi Informatif
- Transparansi Pengungkapan

- **Tansparansi Keterbukaan**

Diketahui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekuarangan dalam transparansi, karena tidak banyak informasi atau laporan terkait keuangan yang disajikan pada website resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga kriteria Informatif dan Pengungkapan tidak dapat tercapai dengan baik. Bagi pengguna atau masyarakat yang membutuhkan informasi terkait keuangan dapat secara langsung menemui pihak yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki transparansi dalam Keterbukaan informasi dengan syarat.

Perwujudan Akuntabilitas

Akuntabilitas Proses

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang ada didalam laporan pedoman kerja. Bahan pustaka yang didapat berasal dari masukan pustakawan atau pengurus perpustakaan. Hal ini dinyatakan oleh Bu Heni selaku pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara:

“Bahan pustaka biasanya itu dari masukan pustakawan atau pengurus perpustakaan, kemudian masukan dari pemustaka tapi bukan hasil dari survey melainkan hasil dari pembicaraan non formal aja.”

Proses pengadaan bahan pustaka biasanya dilakukan oleh bagian PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) dan setelah pesanan diproses, kemudian akan dilakukan pengorganisasian oleh pustakawan yang bertugas. Hal tersebut didukung oleh perkataan Bu Heni:

“Kalau proses pengadaannya itu bagian pak Irwan atau PPKOM, kalau saya di bagian yang menerima sudah jadinya. Kalau sudah selesai prosedur pemesanannya, saya bagian pengorganisasiannya aja.”

Karena perkembangan digital, beberapa prosedur dilakukan secara online ataupun dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Pemesanan bahan pustaka dilakukan secara e-purchasing atau secara online, dan pencatatannya pun dilakukan di aplikasi INLIS Lite yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Irwansyah selaku Pustakawan dan bertugas pada bagian PPKOM:

“Sekarang dimudahkan dengan sistem ya, jadi kalau dengan sistem itu mulai dari kita melakukan proses pemesanan itu secara otomatis karena dia melalui sistem e-purchasing, otomatis tercatat. Kemudian dipindahkan ke INLIS juga tercatat.”

Hal ini membuat berkurangnya rincian pencatatan secara fisik karena mengandalkan aplikasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki laporan anggaran mengenai rincian pengadaan bahan pustaka yang bisa dipublikasikan. Ibu Heni mengatakan bahwa:

“Seingat saya kalau detail jumlah buku beserta anggarannya nggak pernah dilaksanakan seperti itu. Karena itu biasanya yang mengadakan kan PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), tapi setau saya nggak pernah bikin itu sih.”

Selama ini laporan yang tersedia untuk dipublikasikan dan bisa dilihat di website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah laporan Rencana Kerja Anggaran saja, yang dimana laporan tersebut tidak mencakup rincian pengadaan bahan pustaka. Walaupun pencatatan telah masuk ke sistem aplikasi, namun rincian harga bahan pustaka tidak semuanya tercatat secara elektronik dan otomatis. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bu Heni yaitu:

“Tapi kalau rincian buku beserta harga belinya, itu harusnya sih dicantumkan di INLIS Lite karena itu kan menyangkut aset. Jadi sebenarnya di INLIS Lite

harus dicantumkan, tapi karena kami nggak tau berapa harga buku yang ada itu, jadi yaudah kami lewatkan gitu aja, kami nol kan aja.”

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas proses dapat berhasil dan berjalan dengan baik apabila suatu organisasi publik patuh atau taat terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas baik dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan tugasnya.

Secara proses pengadaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah melakukan kegiatan pengadaan bahan pustaka dengan baik berdasarkan anggaran yang diterima. Tetapi pencatatan laporan terkait rincian anggaran seperti rincian harga beli buku pada sistem aplikasi INLIS masih tidak lengkap sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas proses terkait kepatuhan terhadap prosedur.

Akuntabilitas Program

Dalam pengadaan bahan pustakanya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki target berdasarkan kebutuhan pemustaka atau pengunjung dan berdasarkan pembaharuan bahan pustaka. Pak Jumadi selaku Pustakawan mengungkapkan bahwa:

“Yang pastinya harus disesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan pengunjungnya. Belum lagi kita berbicara anak-anak, karena buku anak-anak itu paling cepat satu tahun sudah rusak. Inilah yang harus kita perbarui. Tanggalnya juga, biasanya kan tanggal buku itu ada masanya, selalu ada terbaru setiap jamnya atau perharinya maka kita harus upgrade informasi terbaru, itulah yang kita sediakan. Buku lama yang sudah lama biasanya ada yang disisihkan atau kami simpan kalau kami anggap ini masih layak ya kami pertahankan. Karena ada juga pemustaka yang membutuhkan koleksi lama.”

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebisa mungkin harus menyesuaikan targetnya. Kendala yang membuat bahan pustaka tidak mencapai target adalah karena buku yang dicari terkadang sudah tidak ada lagi, seperti yang diungkapkan Ibu Heni:

“Terkadang jika buku tidak mencapai target itu karena buku yang dicari itu udah nggak ada lagi, kadang-kadang bukunya pas datang itu rusak jadi dikembalikan lagi. Cara menanganinya ya kalau buku yang dicari nggak ada itu cari judul lain, kan biasanya tiap tahun itu beda-beda buku yang terbit.”

Meskipun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkadang menghadapi kendala seperti yang telah diungkapkan Ibu Heni, namun selalu ada cara dalam menanganinya sehingga kendala tersebut tidak berdampak besar terhadap masyarakat yang memanfaatkan jasa dari perpustakaan. Bu Sorra selaku pemustaka atau pengunjung mengatakan bahwa:

“Untuk fasilitas yang dirasakan sebagai pengunjung, ini cukup baik juga ya mbak jadi fasilitasnya itu cukup memadai. Kemudian koleksi bukunya saya lihat selama ini, dari buku kesenian, buku pendidikan, buku kesehatan, dan ilmu pengetahuan itu sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi menurut saya fasilitasnya sudah baik.”

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa keberhasilan dari akuntabilitas program adalah tujuan dapat tercapai dan memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, serta akuntabilitas program tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik hendaknya mampu menjelaskan bagaimana uang tersebut diperoleh dan digunakan untuk apa.

Berdasarkan pengungkapan dari berbagai informan diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menjalankan programnya dengan baik dan sesuai serta mampu menangani masalah sehingga tidak berdampak pada

kebutuhan pengunjung. Sehingga kriteria akuntabilitas program dapat terpenuhi karena tujuan perpustakaan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perwujudan Transparansi

Transparansi Informatif

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki media sosial seperti instagram yang dapat memberikan informasi terkait berita, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Media sosial yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara juga menampung keluhan atau saran dari masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Jumadi selaku Pustakawan:

“Kotak saran ada pastinya, melalui media sosial kami bisa, langsung tanya jawab juga boleh.”

Namun hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melaksanakan survey atau memilah keluhan atau masukan dari publik yang telah ditampung.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pencatatan pengadaan bahan pustaka pada aplikasi INLIS dan e-katalog. Pak Irwansyah mengatakan bahwa INLIS juga menyertakan informasi terkait harga buku, yaitu sebagai berikut:

“Kalau transparansi, kalau saya sederhana, siapapun yang datang itu saya bukakan data. Sebenarnya juga di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terus di INLIS itu selalu menyantumkan jumlah buku harga buku. Kemudian yang kedua, harga yang di e-katalog dengan harga yang kita beli sama. Jadi misalnya gini, kita mau belanja nih, dan di katalog online harganya segitu dan di perpustakaan pun sama.”

Namun Pak Irwansyah juga menambahkan bahwa e-katalog tidak dipublikasikan ke publik:

“Kalau e-katalog beserta rincian harganya itu setau saya tidak dipublikasikan karena tidak ada instruksi untuk mempublikasikan.”

Pak Edwin selaku pegawai bagian Sekretariat mengungkapkan bahwa adanya rencana dalam memenuhi kelengkapan informasi pada website dan aplikasi yang dapat digunakan secara terbuka:

“Biasanya sih di website itu jumlah buku mungkin. Di website itu memang harusnya ada penambahan e-katalog sebetulnya, sementara di website kami kan belum ada e-katalog nyangkut disitu, harusnya itu memang kedepannya memang mengarah kesitu. Tinggal kami aja lagi yang mempelajarinya e-katalog itu bisa connect dengan website kami itu.”

Selain informasi terkait anggaran pengadaan bahan pustaka tidak dipublikasikan kepada publik, diketahui bahwa baliho informasi mengenai anggaran secara umum juga tidak ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini didukung dengan pernyataan dari seorangan pemustaka yaitu Ibu Sorra:

“Kalau di perpustakaan sendiri saya gak liat ada pengumuman anggaran dan semacamnya sih.”

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa transparansi informatif mencakup kemampuan suatu organisasi dalam memberikan arus informasi, berita, prosedur, penjelasan mekanisme, data, dan fakta kepada publik yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Berdasarkan pernyataan informan diatas terkait transparansi informatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi kriteria pada

transparansi informasi karena sudah memberikan informasi seperti berita, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di media sosial agar dapat diakses oleh publik.

Transparansi Pengungkapan

Pada website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah menyajikan informasi terkait susunan kepengurusan, bentuk perencanaan, dan kinerja finansial serta hasil kegiatannya. Namun kekurangannya adalah karena kurangnya pengelolaan website tersebut menyebabkan keterlambatan dalam update informasi, sehingga informasi yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga tidak banyak informasi terbaru yang bisa dilihat oleh publik. Pak Edwin membenarkan hal ini terlebih beliau mengatakan bahwa rincian anggaran tidak dipublikasikan:

”Gak dipublikasikan. Yang dipublikasikan paling kegiatan-kegiatannya aja, kalau anggaran yang terinci gak ada dipublikasikan. Harusnya sih masuk juga. Emang harusnya itu terinci.”

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan dari Bu Heni:

”Seingat saya kalau detail jumlah buku beserta anggarannya nggak pernah dilaksanakan seperti itu. Karena itu biasanya yang mengadakan kan PPKOM, tapi setau saya nggak pernah bikin itu sih.”

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa transparansi pengungkapan berarti mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansial kepada masyarakat atau publik seperti kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum cukup memenuhi kriteria dari transparansi pengungkapan karena saat ini sedang mengalami masalah dalam pembaharuan informasi untuk dipublikasikan. Diketahui informasi terkait rincian anggaran tidak cukup terbuka kepada publik, karena kurangnya kepengurusan dalam menangani website dan aplikasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Transparansi Keterbukaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih cukup tertutup dalam hal laporan anggarannya. Saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya mempublikasikan berita ataupun kegiatan mereka secara terbuka. Namun Pak Irwansyah berkata bahwa:

”Kalau saya sederhana, siapapun yang datang itu saya bukakan data. Sebenarnya juga di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terus di INLIS itu selalu menyantumkan jumlah buku harga buku. Kemudian yang kedua, harga yang di e-katalog dengan harga yang kita beli sama. Jadi misalnya gini, kita mau belanja nih, dan di katalog online harganya segitu dan di perpustakaan pun sama.”

Berdasarkan ungkapan diatas meskipun informasi telah tercatat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan aplikasi INLIS Lite, publik tidak bisa sembarangan mengaksesnya karena yang hanya bisa mengaksesnya adalah admin pengelola itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara membuka kesempatan untuk publik yang membutuhkan informasi bisa langsung meminta ke pihak yang bersangkutan secara langsung.

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa transparansi keterbukaan berarti keterbukaan informasi publik dalam memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Hal tersebut diketahui bertentangan dengan teori dari Mardiasmo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih cukup tertutup dalam memberikan informasi terkait keuangan kepada publik. Data dapat diakses ataupun diperoleh apabila yang membutuhkan informasi meminta izin langsung dengan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk mengakses website atau aplikasi INLIS, harus melalui admin yang bertugas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan yang diperlukan.

SIMPULAN

Diungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam suatu penyelenggaraan kegiatan dan program-program kegiatan instansi pemerintah. Penulis mengangkat isu terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk praktik akuntabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi dua bentuk akuntabilitas, yaitu (1) Akuntabilitas Proses dan (2) Akuntabilitas Program. Secara garis besar penerapan akuntabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui cukup sesuai berdasarkan teori Mardiasmo. Namun terdapat kekurangan pada akuntabilitas adalah kurangnya perlakuan pencatatan secara rinci mengenai pengadaan bahan pustaka secara fisik.

Selain itu, praktik transparansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kartanegara terbagi menjadi tiga bentuk transparansi, yaitu (1) Informatif, (2) Pengungkapan, dan (3) Keterbukaan. Penerapan transparansi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui masih belum cukup terbuka karena adanya keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi terkait laporan anggaran. Website resmi yang disediakan tidak banyak menyajikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban rutin dikarenakan pengelolaan website yang kurang dikelola dengan baik.

Keterbatasan penelitian ini adalah penulis tidak bisa mendapatkan data-data atau dokumen pendukung mengenai penganggaran bahan pustaka secara terperinci yang disebabkan oleh kebijakan dari pengurus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga penulis tidak mampu mengakses data lebih mendalam. Saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat mengkaji akuntabilitas dan transparansi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan lebih banyak informan untuk menggali informasi lebih mendalam menggunakan metode penelitian lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang lebih dalam pada penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I, Dkk, *Statistik Kesehatan: Teori Dan Aplikasi*, ed. by Abdul Karim (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021) <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Books-41931-10_0159.pdf>.
- Bupati Kutai Kartanegara. (2023). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196194/perbup-kab-kutai-kertanegara-no-24-tahun-2021>.
- Daryanto, dan Bambang Suryanto, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, edisi revisi (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2022).
- Hermansyah, I., Rani, & Maman. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21-29. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.711>.
- Hermawan, I., & Musmini, L. (2021). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar dalam Bingkai Yadnya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(3), 559-568. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/36136/21082>.
- Indrayani, *Modul Akuntansi Sektor Publik*, 2022 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5323/1/MODUL_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK.pdf>.

- Irpina, Wiwin. (2021). 'Pengadaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Muaro Jambi', *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4, 108–23 <<https://doi.org/10.30631/baitululum.v4i2.66>>.
- Janis, R., & Budiarmo, N. (2017). Analisis Penerapan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Jemaat Gmish Pniel Biau Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Journal Accountability*, 6(1), 103–111. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/accountability/article/view/16032/15537>.
- Kabib, Nur, Dkk. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 341 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>>
- Khotami, M. (2017). The Theory of Governance & Accountability. 163, 30–33. <https://doi.org/10.2991/1codag-17.2017.6>.
- Khusaini, Nurkholis. *Penganggaran Sektor Publik* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019).
- Lasfita, N., & Muslimin. (2020). Penerapan ISAK NO. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, 1(1), 63–68. <https://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/view/15>.
- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru (Yogyakarta: ANDI, 2018).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi 4 (Yogyakarta: ANDI, 2009).
- Maysarah, Siti. (2023). Efektivitas Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Pt. Inl Siti Maysarah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (2023), 748–56.
- Miles, Matthew, & A Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Mohamad, Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, edisi 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013).
- Mukarom, U., Suryanto, & Mia. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 721–731. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3494>.
- Peraturan Presiden, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Indonesia, 2021), hal. 47 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>>.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan* (Indonesia, 2007).
- Purba, Ramen, Dkk, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*, edisi 1 (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021) <<https://kitamenulis.id/2021/05/25/media-dan-teknologi-pembelajaran/>>.
- R, Aisiyah, 'Prosedur Akuntansi Pengadaan Buku Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jember Dengan Metode Penunjukan Langsung' (Universitas Jember, 2018) <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88368>>.
- Rahardjo, Mudjia, *Paradigma Interpretif* (Malang, 2018) <<https://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf>>.
- Safitri, A., Liya, A., & Dewi, S. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada TPQ Al-Barokah Pekalongan. *JAKA Akuntansi Keuangan dan Auditing*, 2(1), 38–54. <https://doi.org/10.56696/jaka.v2i2.5415>.
- Sudrajat, A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Education and Development Journal*, 9(4), 395–402. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan*, ed. oleh Apri Nuryanto, 3rd edn (Bandung: Alfabeta, 2021).

<https://www.scribd.com/document/709919745/metode-penelitian-pendidikan-sugiyono-2021>.

Umami, Risya, & Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, *Ilmu Ilmiah Ekonomi*, 6 (2017), 74–80 <https://eprints.ummi.ac.id/148/1/6> Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.pdf.

Wulan Sari, Lesa, Yuyun Yumiarty, & Rona Putra. (2023). Analisis Sistem Pengadaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 111. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/3941>.